



BAB I PENDAHULUAN.

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan,



mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Bandung dan sekaligus menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2016 yang tercantum pada RKPD Kota Bandung Tahun 2016, diantaranya;

1. Isu Lingkungan Hidup;
2. Isu Infrastruktur;
3. Isu Kesehatan;
4. Isu Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Isu Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran;
6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
7. Isu Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Isu Perkembangan Teknologi dan Informasi;
9. Isu Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008, dan telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- s. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2013;
- t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009;
- u. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
- w. Peraturan Walikota Bandung Nomor 500 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016
- x. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
- y. Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;
- z. Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.635-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018; dan



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tujuan dan sasaran Renja SKPD serta uraian mengenai program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2016.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT TAHUN 2014

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, pada tahun 2014 ditetapkan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib dengan realisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.415.102.959	2.465.726.150	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai 75) Persentase Layanan Izin sesuai waktu (100%) Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI (850) Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin (8 hari kerja)	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai 83.28) Persentase Layanan Izin sesuai waktu (74%) Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI (930) Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin (8,04 hari kerja)
I.1	Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	155.650.000	154.140.000	Draft Raperwal tentang Izin Gangguan (HO) dan Dokumen Standar Pelayanan Publik	Draft Raperwal tentang Izin Gangguan (HO) sebanyak 1 dokumen dan Dokumen Standar Pelayanan Publik sebanyak 1 dokumen
I.2	Penyusunan/Penyempurnaan Pemeliharaan Sistem Informasi	1.059.540.000	158.947.000	Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikembangkan dan aplikasi ODS (One Day Service)	Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikembangkan dan aplikasi ODS (One Day Service) sebanyak 1 aplikasi
I.3	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan	1.707.527.959	1.684.131.450	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan (1 dokumen)
I.4	Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perizinan	168.525.000	168.525.000	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terseleenggaranya penyebaran informasi pelayanan perizinan selama 1 tahun
I.5	Penyelenggaraan Pameran Perizinan Terpadu Satu Pintu	245.860.000	233.047.700	Terseleenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terseleenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan



I.6	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	78.000.000	66.935.000	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan	selama 1 tahun Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan sebanyak 1 dokumen
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	159.970.340	159.914.340	Nilai evaluasi AKIP (65) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	Nilai evaluasi AKIP (74,22) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)
II.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.493.750	48.493.750	Laporan akuntabilitas kinerja	Laporan akuntabilitas kinerja
II.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	43.432.700	43.376.700	Laporan keuangan semester I	Laporan keuangan semester I
II.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	68.043.890	68.043.890	Laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun

Dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan urusan wajib yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2014, terdapat 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yaitu :

1. Program peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 72,20% dan realisasi outcome (hasil) Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai 83.28), Persentase Layanan Izin sesuai waktu (74%), Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI (930), Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin (8,04 hari kerja), melalui pelaksanaan kegiatan :

- 1) Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum;
- 2) Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi;
- 3) Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan;
- 4) Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan;
- 5) Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu;
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,66 % dan realisasi outcome (hasil) Nilai evaluasi



AKIP (74,22), Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%),
Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%).

Sementara itu masih terdapat 1 target program yang tidak terealisasi, sebagai berikut :

1. Target Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu dengan capaian 74% tidak mampu mencapai 100% karena adanya perbedaan standard waktu penyelesaian izin antara standard waktu yang tercantum dalam SOP yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 1171 dengan instruksi Deputy Kemenpan yang mengacu pada Peraturan Presiden yang mewajibkan penyelesaian pelayanan izin kurang dari 7 hari.



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (tahun berjalan
Kota Bandung ada di file xl



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPT

BPPT Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun sejak BPPT terbentuk, mengingat periode sebelumnya merupakan Renstra yang bersifat revisi sebagai tindak lanjut dari transisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT periode 2010-2013 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Realisasi Tahun 2014
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Perkiraan Tahun 2014	
1	2	3	4	5	6			13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80%	75	95,04%	75	83,28
2.	Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	-	-	NA	100%	NA	100%	66,48%
3.	Persentase Penurunan Pengaduan	-	-	NA	10%	NA	10%	-
4.	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	-	-	NA	850	NA	850	930
5.	Rata-rata waktu penyelesaian izin	-	-	NA	8 hari kerja	NA	8 hari kerja	8,04 hari kerja
6.	Nilai evaluasi AKIP	-	-	NA	CC	NA	CC	B (74,22)
7.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	NA	100%	NA	100%	100%
8.	Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	-	-	NA	100%	NA	100%	100%

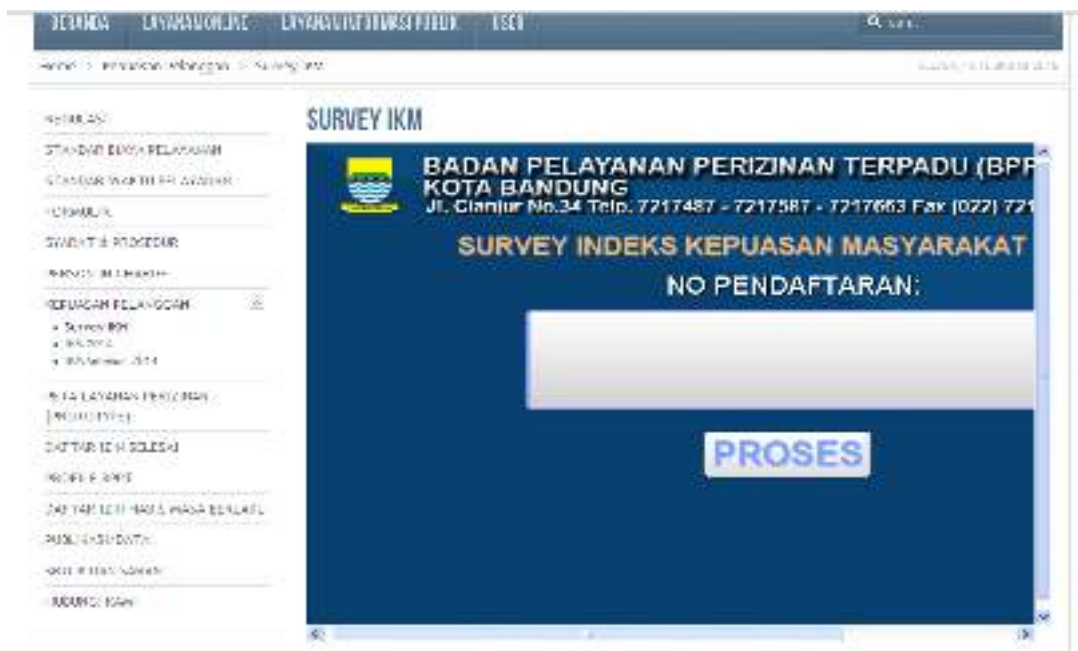
Capaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target tahun 2014 indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada BPPT Kota Bandung sebesar 75 atau kategori "Baik". Pada tahun 2014, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu BPPT Kota Bandung sebesar **83,28** atau mencapai **111%** dari target tahun 2014 sebesar 75.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan program aplikasi "Bandung One Stop Service/BOSS" melalui alamat website resmi BPPT Kota Bandung yaitu www.boss.or.id.

Gambar 3.1
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara *online* dengan program aplikasi "BOSS"



..

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Realisasi IKM sebesar 83,28 didapat dari perhitungan rata-rata empat belas indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kategori
1	Prosedur Pelayanan	84.69	Baik
2	Persyaratan Pelayanan	84.38	Baik
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	85.63	Sangat Baik
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	84.38	Baik
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	84.38	Baik
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	84.06	Baik
7	Kecepatan Pelayanan	83.13	Baik
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	84.38	Baik
9	Kesopanan Dan Keramahan Petugas	82.81	Baik
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	83.75	Baik
11	Kepastian Biaya Pelayanan	81.88	Baik
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	80.94	Baik
13	Kenyamanan Lingkungan	80.63	Baik
14	Keamanan Pelayanan	80.94	Baik
	Rata-rata Nilai IKM	83,28	Baik

Dari tabel 3.1.terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan BPPT Kota Bandung adalah "Baik". Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kejelasan petugas pelayanan di mana petugas pelayanan mengenakan tanda pengenal dan menempati loket sesuai dengan layanan perijinan yang diberikan. Kepuasan masyarakat urutan selanjutnya adalah dalam hal persyaratan pelayanan dan keadilan mendapat



pelayanan karena segala persyaratan permohonan ijin dikomunikasikan kepada pemohon, dan pelayanan diberikan berdasarkan urutan kedatangan pemohon layanan.

2. Persentase Layanan Ijin Sesuai Waktu

Persentase rata-rata kecepatan layanan waktu ijin sesuai waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan.

$$\text{Persentase layanan ijin sesuai waktu} = \frac{\text{Jumlah ijin sesuai waktu}}{\text{Seluruh ijin yang terbit}} \times 100 \%$$

Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 1171 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berikut rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung untuk permohonan baru:

Tabel 3.4
Rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung

No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1	Ijin Gangguan (HO)	12
2	SIUP	10
3	TDP	12
4	IUJK	12
5	IUI	10
6	TDI	12
7	TDG	10
8	Bangunan sampai dengan dua lantai	12
9	Bangunan memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus	20
10	Bangunan lebih dari dua lantai	13
11	Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lantai	13
12	Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang sampai dengan 18 meter	20
13	Bangunan bertingkat dua lantai yang dibebaskan dari perhitungan konstruksi	20
14	Bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi	27
15	Bangunan yang memerlukan rencana instalasi dan	43



No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
	perlengkapan	30 hari kerja
16	Bangunan khusus/tertentu	50
17	Ijin Lokasi	12
18	Izin pematangan lahan/tanah	10
19	Izin penggalian ruang milik jalan (RUMIJA)	10
20	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	10
21	Izin konstruksi pada ruang sungai	10
22	Izin pembuatan jalan masuk pekarangan	12
23	Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	10
24	Izin pembuangan air limbah ke sungai	10
25	Izin pengambilan air permukaan	10
26	Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya	12
27	Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya	12
28	Izin trayek	12
29	Izin jasa titipan	12
30	Izin usaha angkutan	12
31	Izin pengelolaan tempat parkir	12
32	Izin penyelenggaraan reklame	12

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Perwal Nomor 1171 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

Pada tahun 2014, realisasi persentase layanan izin sesuai waktu sebesar 66,48%, mencapai 66,48% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 66,48% tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase ketepatan waktu layanan izin

NO	URAIAN JENIS IZIN	Jumlah Izin Terbit Th 2014	Jumlah Izin terbit Tepat Waktu	Layanan Izin Tepat Waktu (%)
1	Izin Gangguan (HO) / ITU	8048	4164	51,73
2	Izin Usaha Industri (IUI)	87	70	80,46



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**

NO	URAIAN JENIS IZIN	Jumlah Izin Terbit Th 2014	Jumlah Izin terbit Tepat Waktu	Layanan Izin Tepat Waktu (%)
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	605	444	73,39
4	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6770	3477	51,36
5	Tanda Daftar Gudang (TDG)	233	157	67,38
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	233	160	68,67
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	6086	5928	97,4
8	Izin Lokasi	10	10	100
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4500	3758	83,51
10	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	-	-	-
11	Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya	77	7	9,09
12	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	77	34	44,16
13	Izin Pembuatan Jalan di dalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan Yang Sejenisnya	0	0	-
14	Izin Pematangan Lahan / Tanah	32	12	37,5
15	Izin Pengambilan Air Permukaan	0	0	-
16	Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai	48	12	25
17	Izin Pelaksanaan Konstruksi Mengubah Aliran dan/Atau Alur Sungai/Saluran	0	0	-
18	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	154	62	40,26
19	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija)	14	6	43,86
20	Izin Penggunaan Trotoar Dan Saluran	1	1	100
21	Izin Kontruksi Pada Ruang Sungai	0	0	-
22	Izin Pemanfaatan Bantaran Dan Sempadan Sungai	0	0	-
23	Izin Pemanfaatan Bekas Sungai	0	0	-
24	Izin Trayek	665	19	2,86
25	Izin Penyelenggaraan Reklame	4776	3256	68,17
26	Izin Usaha Angkutan	30	12	40
27	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	45	12	26,67



NO	URAIAN JENIS IZIN	Jumlah Izin Terbit Th 2014	Jumlah Izin terbit Tepat Waktu	Layanan Izin Tepat Waktu (%)
	Jumlah	32491	21601	66,48

Dari tabel 3.5, jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu tinggi (mencapai 100%) adalah pelayanan izin lokasi, sedangkan jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu terendah adalah pelayanan izin trayek. Jenis izin yang memiliki ketepatan waktu terendah pada tahun 2014 tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana komputer untuk mengetik keterangan izin serta kurangnya SDM dalam pelayanan trayek.

3. Persentase Penurunan Pengaduan

Indikator Persentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Penurunan Pengaduan} = \frac{\text{Pengaduan tahun ini} - \text{Pengaduan tahun sebelumnya}}{\text{Pengaduan tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung.

Pada tahun 2014, realisasi persentase penurunan pengaduan **belum dapat diukur**. Hal tersebut disebabkan perekapan data komplain yang dilakukan pada triwulan IV tahun 2014 dan data-data triwulan sebelumnya termasuk data tahun 2013 dan sebelumnya tidak dapat dimunculkan akibat bencana kebakaran.



Dari data yang masih ada, yaitu data keluhan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2014, terlihat jumlah pengaduan bulan November – Desember 2014 mengalami penurunan dibandingkan jumlah pengaduan dari Bulan Oktober - November 2014, dengan gambaran sebagai berikut:

No	Bulan	Fluktuasi Naik/Turun	Persentase
1	Oktober-November	Naik	122,22%
2	November-Desember	Turun	81,82%

4. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian kepatuhan tersebut akan dinilai dan dikategorikan ke tiga zona, yaitu merah (kepatuhan rendah), kuning (kepatuhan sedang) dan hijau (kepatuhan tinggi). Adapun variabel yang akan di teliti diantaranya adalah standard pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi, sarana prasarana dan fasilitas, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut pelaksana, dan beberapa komponen lainnya. Metode dalam observasi ini hanya terfokus terhadap implementasi standar pelayanan publik dengan mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2014, realisasi nilai standar pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar **930**, mencapai **109,41%** dari target tahun 2014 sebesar 850. Nilai tersebut



berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI berdasarkan hasil kajian dan penilaian langsung Ombudsman RI dengan metode observasi langsung tanpa pemberitahuan. Nilai sebesar 930 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komponen Indikator Standar Pelayanan Publik Sesuai UU 25 Tahun 2009 BPPT Tahun 2014

No	Variabel Penilaian	Ketersediaan
1	Satu Atap/ Satu Pintu	√
2	Standar Layanan	
	Dasar Hukum	√
	Persyaratan Layanan	√
	SOP Layanan	√
	Alur Layanan	√
	Produk Pelayanan	√
	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	√
	Biaya/ Tarif Layanan	√
3	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	
	Ruang Tunggu	√
	Pendingin Ruangan	-
	Tempat Duduk	√
	Saranan Antrian (tiket)	√
	Toilet	√
	Televisi	√
	Loket/ Meja Pelayanan	√
	Tempat Parkir	√



Profil Petugas/ Person in Charge/ Jumlah	-
Tata Tertib	-
4 Sistem Informasi Pelayanan Publik	√
5 Layanan Berkebutuhan Khusus	
Ram	-
Jalur Pemandu	-
Pegangan Rambatan	-
Tombol Lift Timbul dan Suara	-
Toilet Khusus	-
Ruang Khusus	-
Loket Khusus	-
6 Unit Pengaduan	
Pejabat Pengelola Pengaduan	√
Loket Pengaduan/ Ruangan Pengaduan	√
Sarana Pengaduan	√
Prosedur/Tata Cara Pengaduan	√
Pengelolaan Pengaduan	√
7 Pengukuran Kepuasan Pelanggan	√
8 Visi dan Misi	-
Moto	-
9 Sertifikat ISO 9001:2008	√
10 Pakaian Seragam	√
Jumlah	



Dari tabel 3.6 terlihat masih ada variabel penilaian yang belum dipenuhi oleh BPPT. Ke depan BPPT akan berupaya memenuhi sarana dan prasarana yang belum tersedia terutama terkait sarana dan prasarana untuk kaum difable (layanan berkebutuhan khusus).

5. Rata-rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan

Komitmen dalam pelayanan perizinan adalah kesesuaian waktu dan biaya penyelenggaraan perizinan. Meningkatnya kinerja dapat dilihat dalam rata-rata kecepatan penyelesaian perizinan. Semakin cepat izin selesai maka kinerja aparatur BPPT juga semakin meningkat. Rata-rata kecepatan penyelesaian izin dihitung dengan cara menjumlahkan lama hari berkas pemohon ada di BPPT hingga berkas tersebut terbit dibagi jumlah seluruh berkas yang terbit.

Pada tahun 2014, realisasi rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan selama 8,39 hari kerja, mencapai 95,125% ($\frac{8,39-8}{8} \times 100\%$), dari target tahun 2014 selama 8 hari kerja.

Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2014 dihitung sebagai berikut:

a	Jumlah seluruh berkas yang terbit	32.491 berkas
b	Jumlah waktu pemrosesan seluruh berkas	272.888 hari
c	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2014 (b/a)	8,39 hari

6. Nilai Evaluasi SAKIP

Inspektorat Kota Bandung setiap tahun melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang juklak evaluasi AKIP. Evaluasi atas AKIP pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung tahun 2014 dilakukan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013 oleh Inspektorat Kota Bandung



dilakukan terhadap 4 komponen AKIP, yaitu:1) Perencanaan Kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja dan 4) capaian kinerja.

Evaluasi AKIP atas sistem AKIP BPPT tersebut menghasilkan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Skor Hasil Evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2014

No	Komponen Evaluasi AKIP	Bobot	Skor	% skor terhadap Bobot
1	Perencanaan Kinerja	35	29.79	85.11%
2	Pengukuran Kinerja	25	16.33	65.32%
3	Pelaporan Kinerja	20	14.49	72.45%
4	Capaian Kinerja	20	13.61	68.05%
	Jumlah	100	74,22	

Dari tabel 3.7, terlihat total skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung sebesar 74.22 dengan kategori "B" atau mencapai 114,18% dari target tahun 2014 yaitu nilai evaluasi AKIP sebesar 65.

Dari tabel 3.7.tersebut dapat dilihat bahwa komponen sistem AKIP yang paling menunjukkan kelemahan adalah komponen Pengukuran Kinerja. Hal ini diketahui dari persentase skor terhadap bobot yang memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 65.32%.

Atas evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2014, perbaikan-perbaikan dalam sistem AKIP yang telah dilakukan oleh BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan reuiu Renstra dan melampirkan surat keputusan Walikota Bandung tentang Susunan Tim Penyusunan/ Tim Revisi/ Tim Reuiu Renstra.
- 2) Melaksanakan monotoring/evaluasi/reuiu secara berkala atas dokumen Renstra, RKT, Renja dan TAPKIN.
- 3) Penyampaian dokumen Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut, diharapkan pada tahun 2015 skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung dapat mengalami peningkatan.

7. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Sampai dengan tahun 2014, temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung sebanyak 48 temuan, yang terdiri dari 48 temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (15 temuan tahun 2004-2013 dan 33 temuan tahun 2014).

Dari 48 temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung tersebut, seluruhnya atau 100% telah ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas temuan/saran Badan Pemeriksa Keuangan RI antara lain sebagai berikut:

- a) Temuan BPK bahwa BPPT belum menetapkan kode etik, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPT Nomor 800/1523.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan BPPT Kota Bandung dan Nomor 800/1524.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan BPPT Kota Bandung (terlampir) yang mengacu kepada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 39 tahun 2012 tentang pelaksanaan atas UU No. 25 tahun 2009 serta pemberian sanksi kode etik yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan selalu disampaikan kepada seluruh pegawai BPPT saat apel mulai bekerja setiap harinya agar tertanam dalam pikiran dan perasaannya.
- b) Saran BPK untuk memanfaatkan secara optimal CCTV pada setiap ruang pelayanan dan melakukan evaluasi secara periodik atas pengawasan yang dilakukan melalui



CCTV telah ditindaklanjuti. CCTV yang tersedia di BPPT mengakses ruang pelayanan, dan akan lebih mengoptimalkan penggunaannya serta mengevaluasi secara periodik dengan menggunakan format hasil pengawasan dari masing-masing bidang pelayanan. CCTV yang terpasang tersebut juga menjadi barang bukti pasca kebakaran ruang pelayanan tanggal 4 Oktober 2014.

- c) Saran temuan untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Distarcip dalam menentukan pencatatan fungsi dan klasifikasi bangunan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian IMB telah ditindaklanjuti dengan disepakatinyakoordinasi aktif melalui kesepakatan dalam Berita Acara No. 503/055.1-BPPT dan No. 503/8177-DISTARCI tanggal 21 Oktober 2014 (terlampir) serta pencatatan fungsi/klasifikasi bangunan berpedoman kepada Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW, Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi IMB dan Retrinsusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- d) Saran temuan untuk meningkatkan pengendalian atasan langsung terhadap penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB telah ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP pada Perwal No. 1171 tahun 2013 dan mengagendakan pengendalian berjenjang mulai dari kepala Badan ke kepala bidang dan diteruskan kepada para pelaksana penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB secara sistematis.
- e) Saran temuan untuk menyempurnakan pedoman survey kepuasan pelanggan sesuai keputusan Menpan No. 25/KEP/M.Pan/2/2004 yang selanjutnya menjadi pedoman teknis bagi BPPT dalam melaksanakan survey penilaian kepuasan pemohon dan



- diterapkan secara konsistensudah ditindaklanjuti dan diterapkan sebagai suatu persyaratan pengambilan dokumen perizinan kepada pelanggan untuk membuka *barcode* dokumen ijin dengan mengisi survey kepuasan atas pelayanan BPPT (e-survey).
- f) Saran temuan agar mensosialisaikan kepada masyarakat terkait survey yang dilakukan secara transparan dan akuntabel telah ditindaklanjuti dan hasil survey IKM dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat melalui layanan *website* BPPT pada alamat www.boss.or.id. Sejak tanggal 28 Mei 2015 *website* resmi BPPT adalah bppt.bandung.go.id.
- g) Saran temuan agar menjalankan fungsi pelayanan perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi, kami tindaklanjuti melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 1171 Tahun 2013 tentang SOP Pelayanan Perizinan yang mengacu kepada PP Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011.

8. Persentase Tertib administrasi Barang / Aset Daerah

Indikator "Persentase tertib administrasi barang/aset daerah"diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang. Pada tahun 2014 telah tercapai keseimbangan antara neraca keuangan DPKAD dengan neraca keuangan BPPT, sehingga realisasi indikator ini adalah 100%.

Dari catatan BPPT Kota Bandung maupun catatan DPKAD, nilai barang/aset daerah BPPT Kota Bandung diperlihatkan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengakuan Catatan Aset BPPT Kota Bandung Tahun 2014



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**

No	Jenis Aset	Catatan BPPT	Catatan DPKAD	Selisih
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.064.034.500	2.064.034.500	-
3	Gedung dan Bangunan	23.099.400	23.099.400	-
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	19.866.550	19.866.550	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
Jumlah		2.107.000.450	2.107.000.450	-

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, nilai aset BPPT Kota Bandung menurut catatan BPPT dan DPKAD adalah sama yaitu sebesar Rp2.107.000.450,00. Hal ini dapat direalisasikan karena adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara BPPT dengan DPKAD Kota Bandung.

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja BPPT secara lebih spesifik dan terukur.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2013)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014	
					Target Renja SKPD (tahun 2013)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2013)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.16	Penanaman Modal									
1.16.1.16.01.19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	88,71%	80%	95,04%	119%	75%	75%	100%
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	2 kali	-	1 tahun	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu	4 kali	NA	NA	NA	NA	4 kali	4 kali	100%
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP	CC	NA	NA	NA	NA	CC	CC	100%
		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
		Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPT. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPT. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL

1. Landasan hukum kelembagaan BPPT;
2. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
3. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
4. Adanya komitmen Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi BPPT serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;
5. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;
5. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh



daerah. Hal ini salahsatunya disebabkan oleh belum terdapatnyastruktur khusus di BPPT Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum;

7. Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan;
8. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (Service Level Agreement) BPPT salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain;
9. Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;
10. Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung;
3. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
4. Pengembangan teknologi informasi.



PERMASALAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Lemahnya koordinasi;
4. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian di dinas terkait;
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan BPPT Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.



7. Kelembagaan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kerja perlu di evaluasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu dilakukan terhadap Renstra masing-masing SKPD. Reviu terhadap RKPD baru dilakukan pada pertengahan Juni Tahun 2015. Adanya reviu dari Kemenpan dilatarbelakangi oleh keinginan Bapak Walikota Bandung meraih nilai SAKIP Kota sebesar A.



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Bandung**

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan				
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,600,000,000	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	100%	3,600,000,000
1	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	2 dokumen	300,000,000	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	2 dokumen	300,000,000
2	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	950,000,000	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	950,000,000
3	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	1,750,000,000	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	1,750,000,000



RENJA BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2016

4	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	300,000,000	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	300,000,000
5	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	1 tahun	200,000,000	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	1 tahun	200,000,000
6	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	100,000,000	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	100,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPT Kota Bandung	Nilai evaluasi AKIP (65) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	Nilai evaluasi AKIP (74,22) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	159.970.340	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPT Kota Bandung	Nilai evaluasi AKIP (65) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	Nilai evaluasi AKIP (74,22) Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti (100%) Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah (100%)	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPPT Kota Bandung	Laporan akuntabilitas kinerja	Laporan akuntabilitas kinerja	48.493.750	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPPT Kota Bandung	Laporan akuntabilitas kinerja	Laporan akuntabilitas kinerja	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	BPPT Kota Bandung	Laporan keuangan semester I	Laporan keuangan semester I	43.432.700	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	BPPT Kota Bandung	Laporan keuangan semester I	Laporan keuangan semester I	



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**

3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPPT Kota Bandung	Laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	68.043.890				
---	---	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------	--	--	--	--



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2016**



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2010-2014, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, dengan kegiatan prioritas Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan prioritas nasional, dengan sub-indikator
 - a. Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab/Kota yang terbangun dalam SPIPISE; dengan target Implementasi nasional pada 2014
 - b. Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE; dengan target 50 Kab/Kota dan Propinsi
- 2) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan kegiatan prioritas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal yang merupakan prioritas nasional, dengan sub indikator: Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, dengan target pada 2014 2000 orang peserta untuk 4 jenis pelatihan, termasuk dasar, lanjutan I, lanjutan II dan SPIPISE.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

MISI :

Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BPPT secara berkelanjutan.

TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perizinan

SASARAN :

1. Meningkatnya dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu;
2. Menngkatnya kecepatan penyelesaian pelayanan izin
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.



INDIKATOR KINERJA SASARAN :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu;
3. Persentase Penurunan Pengaduan;
4. Nilai Standar Kepatuhan Versi Ombudsman RI;
5. Rata-rata Waktu Pelnyelelesaian Izin
6. Nilai evaluasi AKIP;
7. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;
8. Persentase tertib administrasi barang/asset daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran dalam rencana strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Pada tahun 2016 BPPT Kota Bandung telah merumuskan 9 (sembilan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program urusan wajib dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 7 (tujuh) program non urusan dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.575.541.500,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Bandung.

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel berikut:



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2015**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Urusan Wajib									
1	16	Penanaman Modal								
1.16	1.16.01	0	1	1	9	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,705,000,000
		0	1			Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP		1 dokumen	220,000,000
		0	2			Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan		1 aplikasi	220,000,000
		0	3			Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan		1 dokumen	2,000,000,000
		0	4			Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan		2 kali	550,000,000
		0	5			Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan		4 kali	550,000,000
		0	6			Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen	165,000,000
1	16	Belanja Non Urusan								
1.16	1.16.01	0	0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratif di lingkungan BPPT Kota Bandung	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,500,000,000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2015**

			0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya	Tersedianya Jasa listrik, paket/pengiriman		1 tahun			1 tahun	
			2	air dan listrik	dan jasa pemasangan iklan			350,000,000			350,000,000
			0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor BPPT rapi dan bersih		1 tahun			1 tahun	
			8					450,000,000			495,000,000
			0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terpelihara		1 tahun			1 tahun	
			9					200,000,000			220,000,000
			1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		1 tahun			1 tahun	
			0					350,000,000			385,000,000
			1	Penyediaan barang cetakan dan	Barang cetakan dan penggandaan		1 tahun			1 tahun	
			1	penggandaan				500,000,000			550,000,000
			1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-		1 tahun			1 tahun	
			5	perundang-undangan	undangan			150,000,000			150,000,000
			1	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu		1 tahun			1 tahun	
			7					200,000,000			250,000,000
			1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar		1 tahun			1 tahun	
			8	luar daerah	daerah			755,000,000			830,000,000
			2	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Keamanan kantor BPPT		1 tahun			1 tahun	
			1					250,000,000			270,000,000
1.16	1.16.01	0	0	Program Peningkatan Sarana dan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok	BPPT	Tersedianya	7,300,000,00	APBD	-	Tersedianya
		1	2	Prasarana Aparatur	dan fungsi	Kota	sarana dan	0	Kota		sarana dan
						Bandun	prasarana		Bandun		prasarana
						g	aparatur		g		aparatur
			0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas		1 paket				3 paket
			5					1,000,000,000			1,100,000,000
			1	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan		1 tahun			1 tahun	
			2		kantor			2,500,000,000			1,000,000,000
			2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 paket			1 paket	
			2					1,000,000,000			220,000,000
			2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpeliharanya kendaraan		1 paket			1 paket	
			4	dinas/operasional	dinas/operasional			800,000,000			835,000,000
			4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana		1 paket		APBD	-	-
			2					2,000,000,000	Kota		-
									Bandun		
									g		



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2015**

1.16	1.16.01	0 1	0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	BPPT Kota Bandung	Peningkatan disiplin aparatur	315,000,000	APBD Kota Bandung	-	Peningkatan disiplin aparatur	346,500,000
				0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas	1 paket	315,000,000			1 paket	346,500,000
1.16	1.16.01	0 1	0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	BPPT Kota Bandung	Meningkatnya kinerja aparatur	870,000,000	APBD Kota Bandung	-	Meningkatnya kinerja aparatur	960,000,000
				0 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll	1 tahun	550,000,000			1 tahun	605,000,000
				0 4	Pembinaan Kinerja Aparatur	Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai	1 kali	320,000,000			1 kali	355,000,000
1.16	1.16.01	0 1	0 6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan	BPPT Kota Bandung	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan	235,000,000	APBD Kota Bandung	-	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan	265,000,000
				0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja BPPT Tahun 2013	1 dokumen	65,000,000			1 dokumen	75,000,000
				0 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2014	1 dokumen	65,000,000			1 dokumen	75,000,000
				0 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan BPPT Tahun 2013	1 dokumen	105,000,000			1 dokumen	115,000,000
1.06	1.16.01	0 1	1 5	Program Pengembangan data/Informasi	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	130,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	143,000,000
				0 1	Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	1 paket dokumen	130,000,000			1 paket dokumen	143,000,000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG
TAHUN 2015**

1.06	1.16.01	0 1	2 1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra dan Renja	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	150,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	165,000,000
				1 6	Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	penyusunan Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	150,000,000			2 dokumen	165,000,000
1.24	1.16.01	0 1	1 5		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	500,000,000	APBD Kota Bandung	-	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	550,000,000
				0 8	Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip BPPT		1 tahun	500,000,000			1 tahun	550,000,000
JUMLAH									16,255,000,000				12,789,500,000



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2016 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung pada tahun 2016.

Akhirnya semoga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam menunjang tercapainya visi Kota Bandung **“Mewujudkan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”**

Bandung, 2015
**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU,**

Drs. H. EMA SUMARNA, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661207 198603 1 006

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kota Bandung

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015
					Target Renja SKPD (tahun 2014)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2014)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10
1	Urusan Wajib								
1.16	Penanaman Modal								
1.16.1.16.01.19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu Persentase Penurunan Pengaduan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	86 100% 80% 890 4.5	95.04% - - - -	75 100% 10% 850 8	83,28 66.48% - - 930	111% 66.48% - 109,41% 95,125%	83 100% - 20% 860	83 100% - 20% 860
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	2 dokumen	2 dokumen
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	4 kali	NA	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	A 100% 100%	69 NA NA	65 100% 100%	74,22 100% 100%	114,18% 100% 100%	76 100% 100%	76 100% 100%
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen

**Capaian Target Renstra
tahun 2015**

**Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)**

11 = (10/4)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Bandung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Perkiraan Tahun 2014	
1	2	3	4	5	6			13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80%	75%	95,04%	75%	
2.	Nilai evaluasi AKIP	-	-	NA	CC	NA	CC	
3.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	NA	100%	NA	100%	
4.	Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	-	-	NA	100%	NA	100%	

No	Survey	7 Button	Jumlah
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	5,836
2		Puas	25,355
3		Kurang Puas	1,627
			32,818
4	Survey Standar Biaya	Sesuai	32,294
5		Tidak Sesuai	524
6	Survey Standar Waktu	Sesuai	30,313
7		Tidak Sesuai	2,505
			131,272

No	Indikator	7 variable	Bidang I
			Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	3,378
2	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	20,443
3	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1,424
4	Survey Standar Biaya	Sesuai	24,957
5	Survey Standar Biaya	Tidak Sesuai	288
6	Survey Standar Waktu	Sesuai	23,168
7	Survey Standar Waktu	Tidak Sesuai	2,077
Jumlah			25,245

25,245

No	Indikator	7 variable	Jumlah
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	5,836
2	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	25,355
3	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1,627
Jumlah			32,818

6,000

5540

92.33%

Persentase

17.78%	95.04%
77.26%	
4.96%	
24.60%	
0.40%	
23.09%	
1.91%	

Bidang II	Bidang III	Bidang IV
Bidang Penataan Ruang, Bangunan, Konstruksi, Pertanahan	Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Bidang Komunikasi dan Informasi serta Perhubungan
1,915	50	493
3,687	250	975
146	8	49
5,540	303	1,494
208	5	23
5,415	289	1,441
333	19	76
5,748	308	1,517

5,748

308

1,517

Persentase	Pengukuran IKM
17.78%	17.78%
77.26%	77.26%
4.96%	-
100%	95.04%

	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
Bidang I	3,378	20,443	1,424
Bidang II	1,915	3,687	146
Bidang III	50	250	8
Bidang IV	493	975	49
	5,836	25,355	1,627

Jumlah
5,836
25,355
1,627
32,294
524
30,313
2,505
32,818

32,818

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Bandung**

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,600,000,000	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	100%	3,600,000,000	
1	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	2 dokumen	300,000,000	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	BPPT Kota Bandung	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP	2 dokumen	300,000,000	
2	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	950,000,000	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	BPPT Kota Bandung	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	950,000,000	
3	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	1,750,000,000	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	1,750,000,000	
4	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	300,000,000	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	300,000,000	
5	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	1 tahun	200,000,000	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	BPPT Kota Bandung	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan	1 tahun	200,000,000	
6	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	100,000,000	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPPT Kota Bandung	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	100,000,000	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA BANDUNG**

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Re Target Capaian Kinerja
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Usuran Wajib							
1.16				Penanaman Modal							
1.16	1.16.01	01	19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,550,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
			01	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP		1 dokumen	200,000,000			1 dokumen
			02	Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan		1 aplikasi	200,000,000			1 aplikasi
			03	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan		1 dokumen	2,000,000,000			1 dokumen
			04	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan		2 kali	500,000,000			2 kali
			05	Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan		4 kali	500,000,000			4 kali
			06	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen	150,000,000			1 dokumen
1.16				Belanja Non Usuran							
1.16	1.16.01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratif di lingkungan BPPT Kota Bandung	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	3,205,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan		1 tahun	350,000,000			1 tahun
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor BPPT rapi dan bersih		1 tahun	450,000,000			1 tahun
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terpelihara		1 tahun	200,000,000			1 tahun
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		1 tahun	350,000,000			1 tahun
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	500,000,000			1 tahun
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	150,000,000			1 tahun
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu		1 tahun	200,000,000			1 tahun
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	755,000,000			1 tahun
			21	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Keamanan kantor BPPT		1 tahun	250,000,000			1 tahun
1.16	1.16.01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Tersedianya sarana dan prasarana	7,300,000,000	APBD Kota Bandung	-	Tersedianya sarana dan prasarana
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas		1 paket	1,000,000,000			3 paket
			12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor		1 tahun	2,500,000,000			1 tahun
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 paket	1,000,000,000			1 paket
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1 paket	800,000,000			1 paket
			42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana		1 paket	2,000,000,000	APBD Kota Bandung	-	-
1.16	1.16.01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	BPPT Kota Bandung	Peningkatan disiplin aparatur	315,000,000	APBD Kota Bandung	-	Peningkatan disiplin aparatur
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas		1 paket	315,000,000			1 paket
1.16	1.16.01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	BPPT Kota Bandung	Meningkatnya kinerja aparatur	870,000,000	APBD Kota Bandung	-	Meningkatnya kinerja aparatur

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Re Target Capaian Kinerja
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll		1 tahun	550,000,000			1 tahun
	04 Pembinaan Kinerja Aparatur	Pegawai BBPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai		1 kali	320,000,000			1 kali
1.16	1.16.01 01 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPPT Kota Bandung	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan	235,000,000	APBD Kota Bandung	-	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan
	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja BPPT Tahun 2013		1 dokumen	65,000,000			1 dokumen
	02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2014		1 dokumen	65,000,000			1 dokumen
	04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan BPPT Tahun 2013		1 dokumen	105,000,000			1 dokumen
1.06	1.16.01 01 15	Program Pengembangan data/Informasi	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	130,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
	01 Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan		1 paket dokumen	130,000,000			1 paket dokumen
1.06	1.16.01 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BPPT Kota Bandung	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung	150,000,000	APBD Kota Bandung	-	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung
	16 Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	penyusunan Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	150,000,000			2 dokumen
1.24	1.16.01 01 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	BPPT Kota Bandung	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	500,000,000	APBD Kota Bandung	-	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
	08 Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip BPPT		1 tahun	500,000,000			1 tahun
JUMLAH					16,255,000,000			

Bandung, Mei 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJIN

Drs. H. EMA SUMARNA, M
Pembina Utama Muda (IV
NIP. 19661207 198603 1 (

ncana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
3,705,000,000
220,000,000
220,000,000
2,000,000,000
550,000,000
550,000,000
165,000,000
3,500,000,000
350,000,000
495,000,000
220,000,000
385,000,000
550,000,000
150,000,000
250,000,000
830,000,000
270,000,000
3,155,000,000
1,100,000,000
1,000,000,000
220,000,000
835,000,000
-
346,500,000
346,500,000
960,000,000

ncana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
605,000,000

355,000,000

265,000,000

75,000,000

75,000,000

115,000,000

143,000,000

143,000,000

165,000,000

165,000,000

550,000,000

550,000,000

12,789,500,000

IAN TERPADU

**1.S1
/c)
006**

572,650,000	479,019,800	83.65% Jumlah investor baru pertahun (5.527 perusahaan)
1,278,400,000	1,131,985,770	88.55% Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (136,73%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)
992,000,000	110,870,000	11.18% Pelayanan perijinan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (100%)
155,000,000	140,014,400	90.33% Indeks kepuasan masyarakat (95,04%)
669,757,490	351,999,500	52.56% Tersusunnya dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Raperwal mengenai Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPPT sebanyak 1 d 2. Raperwal tentang IMB sebanyak 1 dokumen; 3. Raperwal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 1 dokun 4. Raperwal tentang Fraud Control Plan sebanyak 1 dokumen <p style="margin-left: 40px;">207,950,000</p> <p style="margin-left: 40px;">200,625,000</p> <p>Aplikasi pelayanan perijinan yang disempurnakan (1 aplikasi)</p>

lokumen;

nen;

479,019,800
76,275,000
402,744,800
200,625,000
200,625,000
1,145,090,770
435,583,800
197,215,800
156,357,400
145,724,470
210,209,300
-
110,870,000
110,870,000
140,014,400
86,698,600
53,315,800
396,374,500
272,749,500
123,625,000

0

0

0

0